

Kurikulum pendidikan politik dan relevansinya dalam meningkatkan kesadaran politik peserta didik di Indonesia

Political education curriculum and its relevance in enhancing students' political awareness in Indonesia

Mina Umrah Pelas*, Putra Kaslin Hutabarat, Maulina, Winalda Makhrovikha Jauhari, Sarmila Warahmah, Rifaldi Murtada

Universitas Syiah Kuala, Indonesia

* minaumrahpelas@usk.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Democratic education, political awareness, political education curriculum, student political participation

Article History

Received: 2025-07-23
Accepted: 2025-08-04

The political education curriculum plays a crucial role in fostering political awareness and participation among young generations from an early age. This study aims to analyze the role of the political education curriculum in enhancing students' political awareness and participation in schools, identify the challenges in its implementation in Indonesia, and offer solutions to improve its effectiveness. Using a qualitative approach through library research, the study finds that a curriculum integrated with democratic values, civic participation, and contextual learning can positively encourage students' involvement in political life. However, challenges such as teachers' limited competencies, inadequate teaching materials, and cultural resistance hinder its optimal implementation. As a solution, strengthening teacher capacity, updating curriculum content to reflect current socio-political dynamics, and promoting collaboration between schools, government, and civil society organizations are necessary. Therefore, the political education curriculum in schools, when implemented effectively, can function as a strategic tool to foster a democratic, participative, and critical generation of citizens.

Copyright © 2025, Pelas, M. U. et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i2.150](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i2.150)

1. PENDAHULUAN

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai sekumpulan rencana dan regulasi mengenai isi materi dan bahan pembelajaran, beserta metode yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* dan *currere*, yang berarti lintasan atau jalur pacu dalam sebuah perlombaan yang telah ditentukan dan wajib dilalui oleh para pelari atau peserta kompetisi (Wafqin dkk., 2024). Dengan kata lain, jalur tersebut menjadi

rute yang harus dipatuhi oleh para pesaing. Sejalan dengan itu, kurikulum juga dapat dipahami secara sempit maupun luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum adalah kumpulan mata pelajaran yang wajib diikuti atau ditempuh oleh siswa untuk menyelesaikan pendidikannya di suatu institusi tertentu (Fadiya & Darmayanti, 2024; Mulyadi, 2021). Sedangkan secara luas, kurikulum mencakup seluruh pengalaman belajar yang diperoleh siswa selama menempuh jenjang pendidikan tertentu di sekolah (Harmita & Aly, 2023; Rani dkk., 2023).

Upaya memberikan pengalaman belajar sebagaimana makna kurikulum dalam perspektif yang lebih luas tersebut dapat dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak, selama bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam konteks ini, kurikulum tidak hanya terbatas pada rancangan pembelajaran semata, melainkan mencakup keseluruhan proses pendidikan yang menciptakan pengalaman belajar yang bermakna (Mof, 2015). Proses pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dari kurikulum, tetapi kurikulum itu sendiri mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran secara menyeluruh. Dengan demikian, kurikulum menjadi fondasi utama yang mengarahkan dan mengintegrasikan seluruh aktivitas pendidikan di sekolah.

Kurikulum yang efektif adalah yang disusun berdasarkan kondisi nyata kehidupan peserta didik serta dirancang untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi yang relevan guna mencapai tujuan pendidikan (Lazwardi, 2017; Sumantri, 2019). Kurikulum ini perlu terus disempurnakan setiap tahunnya, terutama seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Apabila kurikulum tidak mengalami pembaruan, maka kualitas pendidikan di Indonesia berisiko menurun karena masih menerapkan sistem pembelajaran yang usang. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum saja, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif guru yang memiliki kompetensi, inovasi, dan keterampilan yang tinggi (Mukhlisoh, 2022).

Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Beberapa komponen tersebut adalah tujuan pendidikan, isi atau materi pelajaran, metode atau strategi, dan evaluasi (Achruh, 2019; Hamdi, 2017). Tujuan pendidikan menetapkan hasil akhir yang ingin dicapai melalui pendidikan, seperti pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap peserta didik. Sementara itu, isi atau materi pelajaran merupakan konten atau bahan ajar yang disusun berdasarkan tujuan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan. Adapun metode atau strategi pembelajaran merupakan pendekatan dan teknik yang dipakai oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai (Siregar, 2021). Selanjutnya, evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan sudah tercapai serta menilai efektivitas dari isi materi dan metode pembelajaran yang diterapkan (Hermawansyah dkk., 2024).

Pengembangan kurikulum merupakan proses yang rumit dan melibatkan berbagai aspek. Sekolah, sebagai pelaksana utama dalam penerapan kurikulum, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kemasyarakatan, serta perguruan tinggi yang berperan dalam menghasilkan calon sarjana dan guru (Sukmadinata, 2017). Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang turut memengaruhi pengembangan kurikulum, seperti faktor filosofis, psikologis, sosial budaya, politik, pembangunan nasional dan perkembangan global, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Fadli, 2010).

Untuk memahami bagaimana kurikulum pendidikan politik dapat dirancang secara efektif, terlebih dahulu perlu dipahami komponen-komponen utama dalam pendidikan politik itu sendiri. Dengan memahami unsur-unsur pendidikan politik yang ideal, kurikulum dapat dirancang secara lebih tepat untuk membentuk peserta didik yang sadar politik dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Beberapa unsur penting dalam pendidikan politik antara lain adalah, 1) pengetahuan dasar tentang sistem politik dan demokrasi, 2) pengembangan keterampilan berpikir kritis, 3) keterampilan partisipasi politik, 4) relevansi dengan isu sosial dan politik kontemporer, 5) Pendidikan politik dalam konteks digital, 6) peran lembaga pendidikan dan pemerintah, dan 7) Evaluasi kurikulum pendidikan politik di Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh Kerr (2003) menekankan pentingnya kurikulum pendidikan politik untuk memberikan pemahaman mendasar tentang struktur dan fungsi sistem politik. Pengetahuan ini meliputi pengenalan terhadap lembaga-lembaga politik, proses pemilu, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi. Tanpa pemahaman ini, generasi muda cenderung kesulitan memahami dinamika politik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, materi dasar mengenai sistem politik harus menjadi komponen utama dalam kurikulum pendidikan politik Kesadaran Politik. Barber (2013) juga menekankan bahwa kurikulum pendidikan politik harus mengajarkan siswa untuk tidak hanya memahami informasi politik, tetapi juga mengevaluasinya secara kritis, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan fakta yang valid.

Menurut Verba dkk., (1995) salah satu indikator keberhasilan pendidikan politik adalah peningkatan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan politik, baik dalam bentuk pemungutan suara, kampanye politik, maupun aktivisme sosial. Pendidikan politik yang efektif harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih partisipasi politik, misalnya melalui simulasi pemilu, diskusi kebijakan, atau keterlibatan dalam organisasi sekolah yang berhubungan dengan politik. Selain itu, Susanto (2017) menemukan bahwa banyak siswa merasa tidak tertarik dengan politik karena kurikulum yang mereka pelajari tidak menyentuh isu-isu yang mereka anggap relevan. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperbarui secara berkala untuk mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari generasi muda. Dengan memasukkan isu-isu ini ke dalam kurikulum, pendidikan politik dapat menjadi lebih menarik dan kontekstual bagi siswa.

Dalam pandangan Barber (2013), kurikulum pendidikan politik harus melibatkan pengajaran tentang bagaimana menggunakan media digital secara bertanggung jawab dan bagaimana mengenali berita palsu atau misinformasi. Hal ini sangat penting agar generasi muda dapat memilah informasi yang valid dan tidak terjebak dalam polarisasi politik yang semakin meningkat di media sosial. Wahab & Halimi (2014) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah formal menjadi media utama untuk memperkenalkan materi politik kepada siswa. Namun, partisipasi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk mendukung inisiatif pendidikan politik di luar sekolah. Program pendidikan politik non-formal, seperti pelatihan kepemimpinan atau diskusi publik, dapat menjadi sarana tambahan untuk memperkuat pemahaman politik generasi muda.

Kurikulum pendidikan politik di Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Wahab & Halimi (2014) menunjukkan bahwa materi politik yang diajarkan di sekolah masih terlalu

normatif dan cenderung teoritis, sementara aspek-aspek praktis dari partisipasi politik sering kali terabaikan. Sementara itu, Susanto (2017) mengamati bahwa banyak siswa yang apatis terhadap politik karena kurikulum tidak membangkitkan minat mereka. Ini menuntut adanya reformasi kurikulum yang lebih kontekstual, interaktif, dan relevan dengan perkembangan politik kontemporer serta kebutuhan generasi muda.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran warga negara, terutama dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia. Salah satu komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik, yang memiliki tujuan untuk mengembangkan pemahaman, kesadaran, dan keaktifan siswa dalam dunia politik serta praktik demokrasi. Kurikulum pendidikan politik di sekolah, baik melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun lewat kegiatan ekstrakurikuler, diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi, kepedulian sosial, dan semangat berpartisipasi sejak usia dini.

Namun, realitas menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi politik di kalangan generasi muda masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari rendahnya partisipasi siswa dalam aktivitas politik yang konstruktif, minimnya ketertarikan terhadap isu-isu publik, serta kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sisi lain, implementasi kurikulum pendidikan politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, hingga resistensi kultural dan politis yang membatasi ruang gerak pendidikan politik di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada proses implementasinya, tetapi juga pada desain kurikulum yang belum sepenuhnya kontekstual, aplikatif, dan menarik bagi generasi muda. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana kurikulum pendidikan politik dapat membangun kesadaran dan partisipasi politik siswa, mengenali berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta merancang solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas kurikulum tersebut. Penelitian ini berangkat dari tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana peran kurikulum pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik siswa di sekolah? (2) Bagaimana tantangan dalam implementasi kurikulum pendidikan politik di Indonesia? dan (3) Bagaimana solusi untuk meningkatkan efektivitas kurikulum pendidikan politik di Indonesia?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai peran, tantangan, dan solusi kurikulum pendidikan politik di Indonesia melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan pendidikan, serta artikel yang mendukung topik. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengakses dan mengkaji berbagai dokumen seperti kurikulum nasional, modul pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas pendidikan politik, kesadaran politik siswa, dan praktik pendidikan demokrasi di sekolah. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder dari laporan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan demokrasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari setiap literatur, mengelompokkannya sesuai dengan rumusan masalah, serta menginterpretasikan makna dan hubungan antara temuan-temuan tersebut secara kontekstual. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk merumuskan jawaban atas tiga fokus utama penelitian: (1) peran kurikulum pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik siswa; (2) tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum; dan (3) strategi atau solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pendidikan politik di sekolah. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran konseptual dan praktis yang komprehensif terhadap dinamika pelaksanaan kurikulum pendidikan politik di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih partisipatif dan demokratis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran kurikulum pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik siswa di sekolah

Kesadaran dan keterlibatan politik siswa di sekolah secara signifikan dibentuk oleh kurikulum pendidikan politik (Putri dkk., 2024). Siswa dapat memperoleh pemahaman tentang sistem politik, hak dan tanggung jawab warga negara, dan nilai berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memasukkan pendidikan politik ke dalam kurikulum (Kamarga, 2004). Sekolah memainkan peran penting sebagai media pendidikan politik yang dapat menanamkan kesadaran politik sejak dini. Melalui mata pelajaran PPKn serta kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS dan pramuka, sekolah menyediakan ruang pembelajaran yang tidak hanya informatif tetapi juga aplikatif. Siswa dikenalkan pada isu-isu politik yang relevan dan dilatih untuk berpikir kritis, termasuk dalam menyaring informasi dan hoaks politik yang beredar di masyarakat (Kris Y, 2020).

Kurikulum pendidikan politik juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif siswa dalam berbagai aktivitas politik yang bersifat edukatif dan konstruktif. Pemahaman yang diperoleh melalui pembelajaran mendorong siswa untuk terlibat dalam praktik demokrasi sederhana di lingkungan sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS, diskusi kebijakan internal, hingga keterlibatan dalam organisasi kesiswaan. Aktivitas ini menjadi indikator konkret keberhasilan kurikulum dalam membentuk warga negara muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa (Pratiwi, 2024).

Selain pengetahuan dan partisipasi, kurikulum pendidikan politik juga berperan penting dalam pembentukan sikap demokratis siswa. Melalui proses pembelajaran yang terstruktur, siswa tidak hanya memahami konsep-konsep politik secara teoritis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kurikulum yang mengintegrasikan etika politik dan nilai-nilai moral kebangsaan mampu menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis dan dialogis, yang mendorong siswa untuk aktif menyampaikan pendapat dan berpikir kritis terhadap berbagai isu sosial-politik (Prayugo & Prayitno, 2022).

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan politik di Indonesia saat ini masih bersifat normatif dan terlalu teoritis, sehingga kurang menarik minat siswa dan sulit diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kondisi ini

menunjukkan perlunya reformasi kurikulum secara menyeluruh agar lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan generasi muda. Pendekatan yang lebih interaktif, berbasis isu aktual, dan menyentuh kehidupan sehari-hari siswa diyakini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran politik serta mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan bangsa (Pratiwi, 2024).

3.2. Tantangan dalam implementasi Kurikulum Pendidikan Politik di Indonesia

Dalam upaya menciptakan generasi muda yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, Indonesia telah mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah. Namun, pelaksanaan kurikulum pendidikan politik ini tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran pendidikan. Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan program lain seperti alokasi dana besar (\$28 miliar per tahun) untuk program makan gratis dinilai sebagian pihak sebagai pengalihan yang mengorbankan kualitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk penguatan pendidikan politik. Situasi ini dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya pengembangan kurikulum dan penyediaan sarana pembelajaran yang memadai di bidang ini.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala serius. Tidak semua pendidik memiliki kompetensi atau pelatihan yang memadai untuk menyampaikan materi politik secara netral, kontekstual, dan konstruktif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik pembelajaran dengan materi yang bias dan tidak efektif yang justru bertolak belakang dengan tujuan pendidikan politik itu sendiri, yaitu membentuk warga negara yang kritis dan reflektif (Giyandri & Sinaga, 2024). Tantangan lainnya adalah kesenjangan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, yang seringkali belum memiliki akses terhadap fasilitas dan media pembelajaran yang menunjang penyampaian materi politik secara menarik dan komprehensif (Kamarga, 2004).

Di samping itu, resistensi kultural dari masyarakat turut menghambat implementasi kurikulum ini. Masih banyak kalangan yang menganggap pendidikan politik sebagai bentuk indoktrinasi atau politisasi yang tidak semestinya diajarkan di sekolah karena dinilai berpotensi memengaruhi ideologi peserta didik (Sihono, 2024). Anggapan ini tentu saja dapat menimbulkan penolakan terhadap materi politik, sehingga sekolah menjadi ragu dalam menjalankan kurikulum secara utuh. Terakhir, dinamika sosial-politik nasional yang terus berubah juga menjadi faktor penghambat. Setiap pergantian pemerintahan atau perubahan arah kebijakan politik seringkali disertai dengan revisi kurikulum yang tidak terencana secara sistematis. Akibatnya, guru dan siswa kesulitan beradaptasi, sementara kesinambungan pembelajaran terganggu (Giyandri & Sinaga, 2024).

3.3. Solusi untuk meningkatkan Efektivitas Kurikulum Pendidikan Politik di Indonesia

Di Indonesia, pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus yang memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara (Amalina, 2024). Meskipun demikian, efektivitas kurikulum pendidikan politik masih terkendala oleh sejumlah persoalan, seperti kurangnya pendekatan pengajaran yang interaktif serta materi yang belum sepenuhnya relevan dengan dinamika politik dunia nyata. Untuk itu, dibutuhkan solusi yang bersifat strategis dan inovatif agar kurikulum pendidikan politik

benar-benar mampu memfasilitasi siswa menjadi warga negara yang sadar, peduli, dan aktif dalam kehidupan demokratis.

Salah satu strategi utama adalah menekankan pendidikan karakter sebagai fondasi pembelajaran politik. Pendidikan politik tidak cukup hanya menyampaikan teori tentang sistem pemerintahan, tetapi juga harus membentuk karakter siswa yang jujur, toleran, bertanggung jawab, dan memiliki empati sosial (Anugrah dkk., 2021). Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui aktivitas mentoring, keterlibatan sosial, dan pengintegrasian materi politik dengan nilai-nilai moral praktis. Misalnya, diskusi tentang pentingnya kejujuran dalam pemilu atau tanggung jawab dalam pengambilan keputusan politik dapat menjadi media reflektif untuk memperkuat kesadaran etis siswa dalam berpolitik.

Selain itu, penguatan metode pengajaran yang lebih interaktif juga sangat diperlukan. Kurikulum pendidikan politik akan lebih efektif jika disampaikan melalui pendekatan yang mendorong partisipasi aktif siswa, seperti diskusi kelompok, debat, simulasi sidang parlemen, dan studi kasus (Kamarga, 2004). Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mengasah keterampilan berpikir kritis, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam memahami dinamika demokrasi. Teknologi juga dapat dimanfaatkan melalui platform e-learning dan aplikasi interaktif untuk memperluas akses terhadap informasi politik dan membuka ruang diskusi daring yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Dalam konteks kelembagaan, kolaborasi antar pihak menjadi faktor penting yang perlu diperkuat. Kerja sama antara sekolah, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga riset akan menjadikan pendidikan politik lebih kontekstual dan bermakna (Sugara dkk., 2024). Melalui program magang, seminar, kunjungan ke lembaga pemerintahan, maupun pelibatan siswa dalam riset sosial-politik, siswa akan mendapatkan pemahaman politik yang lebih konkret. Peran media dalam menyajikan informasi politik yang akurat juga sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran (Anugrah dkk., 2021).

Terakhir, efektivitas kurikulum pendidikan politik sangat bergantung pada adanya evaluasi dan pembaruan secara berkala. Dalam situasi politik yang terus berubah, materi kurikulum perlu disesuaikan agar tetap relevan dan kontekstual (Paskarina dkk., 2023). Proses evaluasi idealnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti siswa, guru, dan ahli pendidikan politik, untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya informatif tetapi juga adaptif terhadap tantangan zaman. Pengayaan materi dengan topik-topik seperti politik digital, gerakan sosial kontemporer, atau isu lingkungan politik global akan membantu siswa memahami politik dalam kerangka yang lebih luas dan kritis.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik peserta didik. Melalui integrasi nilai-nilai demokrasi, pemahaman hak dan tanggung jawab kewarganegaraan, serta pendekatan pembelajaran yang kontekstual, kurikulum mampu menjadi instrumen pendidikan politik sejak dini. Namun, implementasi kurikulum ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi guru, minimnya dukungan sumber daya, dan resistensi kultural terhadap muatan politik di sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kurikulum yang lebih relevan dengan dinamika sosial-politik kontemporer,

penguatan kapasitas guru, serta kolaborasi yang lebih luas antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis dan partisipatif di Indonesia. Artikel ini menekankan pentingnya melihat pendidikan politik bukan hanya sebagai pengajaran normatif, tetapi sebagai upaya strategis membentuk karakter warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Studi ini juga memperkuat urgensi pengembangan kurikulum yang tidak hanya informatif tetapi juga transformatif dalam konteks pendidikan kewarganegaraan abad ke-21. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, sehingga belum menggambarkan secara empiris bagaimana implementasi kurikulum pendidikan politik berlangsung di sekolah-sekolah secara langsung. Untuk itu, studi selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara, atau survei untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik nyata di kelas, respons peserta didik, serta efektivitas metode yang digunakan dalam pendidikan politik di berbagai konteks sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achruh, A. (2019). Komponen dan model pengembangan kurikulum. *Inspiratif Pendidikan*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.9933>
- Amalina, A. A. (2024). Dampak kebijakan perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.17977/um027v7i12024p113>
- Anugrah, S., Jalinus, N., Abdullah, R., Mudjiran, M., Austin, D. A., & Rayendra, R. (2021). Peran politik terhadap pengembangan dan implementasi kurikulum. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(2), 139–143. <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v21i2.1135>
- Barber, B. R. (2013). *If mayors ruled the world: Dysfunctional nations, rising cities*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300164831>
- Fadiya, N. A., & Darmayanti, H. A. (2024). Administrasi kurikulum pendidikan. *Tasyri` : Jurnal Tarbiyah-Syari`ah-Islamiah*, 31(02), Article 02. <https://doi.org/10.52166/tasyri.v31i02.637>
- Fadli, F. (2010, Maret 24). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. *Fadlibae Weblog's*. <https://fadlibae.wordpress.com/2010/03/24/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengembangan-kurikulum/>
- Giyandri, T. F., & Sinaga, J. B. B. (2024). Tantangan dan dinamika penerapan teori politik kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 371–378. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1919>
- Hamdi, M. M. (2017). Konsep pengembangan kurikulum. *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–18.
- Harmita, D., & Aly, H. N. (2023). Implementasi pengembangan dan tujuan kurikulum. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(1), 114–119. <https://doi.org/10.26499/multilingual.v3i1.125>

- Hermawansyah, H., Damopolii, M., & Yuspiani, Y. (2024). Evaluasi dalam proses pembelajaran. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 731–738. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2143>
- Kamarga, H. (2004). Peran sekolah dalam pengembangan kurikulum. *Inovasi Kurikulum*, 1(1), 26–33. <https://doi.org/10.17509/jik.v1i1.35609>
- Kerr, D. (2003). Citizenship education in England: The making of a new subject. *JSSE - Journal of Social Science Education*. <https://doi.org/10.4119/jsse-287>
- Lazwardi, D. (2017). Manajemen kurikulum sebagai pengembangan tujuan pendidikan. *Al-Ijarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1), 119–125. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v7i1.1112>
- Mof, Y. (2015). Manajemen implementasi kurikulum dan proses pembelajaran. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 118–131. <https://doi.org/10.18592/jtipai.v5i2.1835>
- Mukhlisoh, E. (2022, November 13). *Perubahan kurikulum dan dampaknya pada pendidikan*. Kumparan. <https://kumparan.com/elis-mukhlisoh/perubahan-kurikulum-dan-dampaknya-pada-pendidikan-1zEdlssOdrq>
- Mulyadi, D. (2021). Implementasi Kurikulum 2013 (revisi) di Sekolah Menengah Atas pada mata pelajaran peminatan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 5(1), 7–22.
- Paskarina, C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2023). Pengembangan desain kurikulum ilmu politik dalam konteks Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *Dharmakarya*, 11(4), 361. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v11i4.36717>
- Pratiwi, V. D. (2024). Kurikulum pendidikan politik bagi generasi muda. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 13(2), 83–88. <https://doi.org/10.37755/jspk.v13i2.1432>
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan politik sebagai proses belajar membentuk kesadaran politik dan peran kewarganegaraan. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- Putri, R., Suwandi, S., Putri, M. F. J. L., Sulastri, S., & Nurdiyana, N. (2024). Implementasi pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka: Studi kasus SMK negeri 8 kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.61476/4we59640>
- Rani, P. R. P. N., Asbari, M., Ananta, V. D., & Alim, I. (2023). Kurikulum Merdeka: Transformasi pembelajaran yang relevan, sederhana, dan fleksibel. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 78–84. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.736>
- Sihono, S. (2024). Tantangan politik di Indonesia tahun 2024: Membangun kepemimpinan pendidikan Islam. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(2), 491–506. <https://doi.org/10.14421/njpi.2024.v4i2-12>
- Siregar, R. L. (2021). Memahami tentang model, strategi, metode, pendekatan, teknik, dan taktik. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 63–75. <https://doi.org/10.55403/hikmah.v10i1.251>

- Sugara, H., Mutmainnah, F., & Safitri, D. N. (2024). Pendidikan politik lintas generasi dalam membangun partisipasi politik menghadapi suksesi tahun politik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 118–128. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i1.6493>
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktik*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumantri, B. A. (2019). Pengembangan kurikulum di Indonesia menghadapi tuntutan kompetensi abad 21. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 13(2), 146–167. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v13i2.661>
- Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 379–398. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Wafqin, M. S. I., Ramadhani, Y., Widiawati, M., Sofia, S., Charisya, R. M., & Azizah, U. N. (2024). Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 7(6), 203–214. <https://doi.org/10.32764/joems.v7i6.1315>
- Wahab, A. A., & Halimi, M. (2014). Hakikat dan karakteristik mata kuliah konsep dasar IPS. Dalam *Konsep Dasar IPS* (300; Vol. 1, Nomor 300, hlm. 1–41). Universitas Terbuka. <https://repository.ut.ac.id/3981/>